**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA**

**DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017**

Dwi Riztita Vinora

NPP. 29.0260

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: dwiriztitavinora@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Participation is an important element in a democratic system and is one of the reasons for holding simultaneous regional elections. The problem related to women's participation in this research location is the unstable number of women's participation with the number of permanent voters especially women. Of course, this condition is very dear to us, unfortunately, there are many people who do not use their voting rights, and this is indeed a national phenomenon, not only in Riau. Pekanbaru. **Objectives:** The purpose of this study is to determine and discuss the level of participation of female politicians in the mayoral election in the Senapelan sub-district of Pekanbaru city, to find out the inhibiting factors for the low level of female political participation in the election of mayors in Senapelan sub-district, Pekanbaru city and to find out the efforts made in order to increase women's political participation in Mayor election in Senapelan sub-district, Pekanbaru city. The method used in this research is using a qualitative descriptive method and an inductive approach. The technique used in data collection is through interviews and documentation, as well as data analysis techniques through data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. **Results/Findings:** The finding that the high and low level of participation of women politicians in the mayoral election in the Senapelan sub-district of Pekanbaru city is influenced by several factors. The low level of female politicians' participation in the mayoral election in the Senapelan sub-district of Pekanbaru city shows an unstable number. **Conclusion:** The level of women's political participation in the mayoral election in the Senapelan sub-district of Pekanbaru city in 2017 the unstable number of women's participation with the number of permanent voters especially female novice voters. The inhibiting factors for the low level of women's political participation in the mayoral election in the Senapelan sub-district of Pekanbaru city in 2017 include low political trust, socio-economic background factors, lack of socialization factors, and administration factors.

***Keywords:*** Political Participation, Women, Mayor Election

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Partisipasi merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi dan menjadi salah satu alasan dilaksanakannya pilkada serentak. Adapun permasalahan terkait dengan partisipasi perempuan pada lokasi penelitian ini adalah tidak stabilnya angka partisipasi perempuan dengan jumlah pemilih tetap khsusus perempuan. Tentu saja kondisi seperti ini sangat kita sayangkan, banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, dani ini memang merupakani gejala nasional, bukan hanya di Riau saja. Hal ini tentu saja menjadi kajian yang menarik untuk menelaah partisipasi perempuan pada agenda Pilwako kota Pekanbaru.

**Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan membahas tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru, mengetahui faktor penghambat rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru serta mengetahui upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan**: Temuan yang diperoleh tinggi rendahnya tingkat partisipasii politiki perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru dipengaruhi beberapa faktor. Rendahnya tingkat partisipasii politiki perempuan dalami pemilihaniWalikota dii kecamatan senapelan kota Pekanbaru menunjukkan angka yang tidak stabil. **Kesimpulan:** Tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017 tidak stabilnya angka partisipasi perempuan dengan jumlah pemilih tetap khsusus pemilih pemula perempuan. Faktor penghambat rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017 antara lain faktor rendahnya kepercayaan politik, faktor latar belakang sosial ekonomi, faktor kurangnya sosialisasi, dan faktor administrasi.

**Kata kunci:** Partisipasi Politik, Perempuan, Pemilihan Walikota

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama dalam pemilihan umum, karena hak dalam pemilihan umum merupakani Hak Asasi Manusia yang telah diatur pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta telah dijelaskan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentangi Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakani hak dasar yang telah ada pada diri setiap manusia sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Bahkan, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang tidak dapat dilepas atau dikurangi dari diri setiap manusia sampai kapanpun.

Partisipasi merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi dan menjadi salah satu alasan dilaksanakannya pilkada serentak. Partisipasi merupakan keikutsertaan warga negara didalam proses politik (pilkada), baik sebagai kontestan maupun sebagai pemberi suara. Partisipasi perempuan dikancah perpolitikan nasional dan regional harus mendapat perhatian yang serius. Mengingat tingkat partisipasi perempuan dalam lingkup eksekutif dan legislatif dinilaii masihi sangati minim. Hali inii dapati dilihati darii jumlahi wanita yangi terlibat berpartisipasi pada penyelenggaraan pemilihan kepada daerah.

Jika dikaitkan dengan teorinya partisipasi, partisipasi merupakan keikut-sertaan suatu individu dalam segi mental dan emosiaonal dalam pembuatan keputusan. Partisipasii politiki secarai harfiahi berartii keikut-sertaan, dalami hali inii maksudnya adalah ikut sertanya warga negara dalam berbagai proses politik seperti dukungan atau penolakan dalam aspek kebijakan pemerintahan. Jika masyarakat hanya mematuhi seluruh kebijakan pemerintahan, hal ini juga bisa disebut mobilisasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari masyarakat dengan cara ikut serta dalam pemilihan penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung.[[1]](#footnote-1) Lebih lanjut menurut Ramlan Surbakti , patisipasi politik merupakan ikut sertanya wargai negarai dalami mengambil keputusan pemerintahan yang bersangkutan atau dapat mempengaruhi hidupnya.[[2]](#footnote-2)

Alasan penulis memilih kecamatan senapelan sebagai studi kasus adalah erat kaitannya dengan historis atau sejarah kota Pekanbaru. Sebelum menjadi Pekanbaru, kota Pekanbaru disebut dengan nama "Senapelan". Pada tangal 15 Februari 2017 Kota Pekanbaru melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai wujud dari rangkaian Pilkada serentak yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Padai tahun 2011, jumlah pemilih mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya di tahun 2006 dan jumlah pemilih bertambah kembali pada tahun 2017, tetapi jumlah tersebut masih dibawah target KPUD kota Pekanbaru sendiri. Berikut ini akan diuraikan perkembangan tingkat partisipasi dalam beberapa Pilwako.

Tabel 1. 1

Data Partisipasi pada Pilwako Pekanbaru dalam 3 peride pemilihan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pilwako Tahun** | **Tingkat Partisipasi** |
| 1. | Pilwako 2006 | 286.489 (55%) |
| 2. | Pilwako 2011 | 253.252 (49%) |
| 3. | Pilwako 2017 | 293.537(51%) |

***Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017***

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa persentase 3 periode pelaksanaan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru tidak mencapai angka yang ditargetkan oleh KPUD Kota Pekanbaru yakni sebesar 71%. Usaha seperti sosialisasi yang digelar oleh KPUD Kota Pekanbaru belum bisa meningkatkan jumlah pemilih di Kota Pekanbaru serta masih banyak terdapat masyarakat yang bersikap apatis dalam Pilwakobesar ini.

Adapun permasalahan terkait dengan partisipasi perempuan pada lokasi penelitian ini adalah tidak stabilnya angka partisipasi perempuan dengan jumlah pemilih tetap khsusus perempuan. Tentu saja kondisi seperti ini sangat kita sayangkan, banyaknya masyarakat yangi tidak menggunakan hak suaranya, dan ini memang merupakan gejala nasional, bukan hanya di Riau saja. Selama ini banyak di daerah lain juga terjadi penurunan pada Pilwako kota Pekanbaru. Hal ini tentu saja menjadi kajian yang menarik untuki menelaah partisipasi perempuan pada agenda Pilwako kota Pekanbaru. Mengidentifikasi dan menelaah berbagai upaya agar partisipasi perempuan meningkat.

Banyak sedikitnya partisipan dalam politik bergantung pada sikap apatis serta apriori masyarakat aktifitas dan kegiatan politik, sehingga masyarakat lebih mementingkan untuk melakukan aktivitas masing-masing seperti bekerja, berlibur, berolahraga, klubi sosial, dani lainnya karena masyarakat merasakan hal tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata daripada harus berpartisipasi dalam bidang politik. Bagian ini penulis akan fokus terhadap tingkat partisipasi perempuan pada pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru. Pada bagian ini akani diuraikan dataipartisipasi perempuan pada pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017

Untuk memperkuat uraian diatas, penulis akan menguraikan Tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih [[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1. | Pemilih | 10.005 | 10.732 | 21.648 |
| 2. | Pengguna Hak Pilih | 6.042 | 6.732 | 13.180 |

Tabel 1. 3

Suara Sah dan Tidak Sah [[4]](#footnote-4)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No |  | Total |
| 1. | Suara Sah | 12.948 |
| 2. | Suara Tidak Sah | 415 |
| Jumlah | | 1.527 |

Berdasarkan 2 Tabel diatas, menunjukkan masih minimnya partisipasi perempuan dalam menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pemilih perempuan 10.732, hanya 6.732 orang yang menggunakan hak pilihnya. Belum lagi dikalkulasikan dengan suara yang tidak sah yang juga cukup memberikan pengaruh signifikan.

Memang data perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, akan tetapi partisipasi politik tidak hanya sebatas ikut memberikan suara dan mendapatkan pendidikan politik agar cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Inilah yang menjadi poin yang ingin penulis teliti, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempun. Beberapa hal tersebut menarik minat peneliti, untuk melihat sejauh mana partisipasi pemilih perempuan dalam menentukan pilihannya pada pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru, serta faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan politiknya.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Melihat berbagai permasalahan yang ada, untuk mempersempit ruang lingkup penelitian peneliti perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti agar dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian dan juga karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga serta keefektifan hasil penelitian, Penulis memfokuskan masalah pada Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai fokus penelitian di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

1. Belum Maksimalnya tingkat partisipasi politik perempuan saat pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru.
2. Kurangnya sosialisasi terkait tingkat jumlah partisipan politik perempuan pada pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru.
3. Kurangnya kesadaran perempuan pada pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru.
4. Belum adanya upaya peningkatan jumlah partisipan politik perempuan pada pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru.
   1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Dari sumber kepustakaan maupun media elektronik terhadap penelitiani yangi pernahi dilakukani sebelumnyai terkait dengani penelitiani ini, penulis menemukan penelitiani yang sama atau identik dengani penelitiani yangi dilakukani olehi penulis, diantaranya:

Tabel 1. 4

Penelitian Sebelumnya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Penelitian** | **Peneliti** | **Tahun** |
| 1. | Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2008 | Yusmanto Fakultas Hukum Universitas Lampung | 2011 |
| 2. | Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2013 (Studi Kasus Di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) | Susanti Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau | 2015 |
| 3. | Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi Kasus Partisipasi Pemilih Perempuan Di Kecamatan Sumbawa) | Edrial Universitas Samawa, | 2019 |
| 4. | Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia | Rizki Priandi1 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro | 2019 |
| 5. | Pandangan Pemilih Perempuan Dengan Pendidikan Rendah Terhadap Isu Gender Dalam Partisipasi Politik (Studi Deskriptif di Desa Tembung Dusun IX Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupten Deli Serdang) | Aqillah Savina Zain, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara | 2020 |

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni memang data perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, akan tetapi partisipasi politik tidak hanya sebatas ikut memberikan suara dan mendapatkan pendidikan politik agar cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Inilah yang menjadi poin yang ingin penulis teliti, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

* 1. **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuii dan membahas tingkat partisipasii politiki perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru.

1. **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan Senapelan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Pekanbaru, dan Masyarakat Khususnya Perempuan di Kecamatan Senapelan. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi politik sebagaimana yang disampaikan oleh Herbert McClosky. Menurut Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). Definisi yang dikemukakan McClosky sebagaiamana yang dikutip oleh Miriam Budiardjo menitikberatkan pada tindakan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik yaitu adanya tindakan sukarela dari warga masyarakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

**3.1.** **Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**

Pemberian ruang partisipasi masyarakat pada proses perjalanan tata kelola pemerintahan, bukan hanya dimaknai sebagai ajakan bagi masyarakat pada proses perencanaan kebijakan dan pembangunan. Tetapi sifatnya kesegala lini, baik keterlibatan dalam proses perencanaan, implementasi, evaluasi, respon, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, kebijakan, dan lain sebagainya.

Dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), bentuk partisipasi yang digunanakan adalah partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga Negara masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan hukum.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, Misalnya sajafaktorusia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

Partisipasi perempuan di dalam politik pada hakikatnya merupakan bentuk perjuangan perempuan untuk memperoleh jumlah wakil yang memadai dan ideal untuk menyalurkan segala bentuk aspirasi perempuan mengingat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki laki sehingga sampai saat ini jumlah keterwakilan perempuan dalam politik masih dianggap sangat kecil. Bentuk partisipasi politik perempuan tentu tidak hanya dilihat dari kuota keterwakilan perempuan di sektor legislatif. Ada indikator lain yang dapat menggambarkan partisipasi politik perempuan. Salah satunya adalah partisipasi dalam memberikan suaranya. Antara usia pemilih pemula perempuan dengan bukan pemilih pemula memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan pilhannya. untuk menggali lebih dalam terkait dengan persoalan ini, penulis melakukan wawancara dengan responden.

Begitu juga yang disampaikan berdasarkan wawancara dengan Bapak Fikri dari KPU Kota Divisi Perencanaan Program, Data dan Informasi yang menyatakan bahwa “ Partisipasi pemilih pemula sangat ditentukan seberapa jauh mengetahui dan mengenali kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan perempuan yang sudah sering ikut serta dalam memberikan partisipasi relatif cukup mudah dalam memahami dan menentukannya. Oleh karena itu perlu upaya dan kerja keras dalam meningkatkan partisipasi perempuan. Partisipasi yang dimaksud disini tidak hanya sekedar datang dan pergi ketika Hari H pemilihan, akan tetapi kualitas partisipasi yang perlu ditingkatkan. Misalnya aktif dalam setiap tahapan.[[5]](#footnote-5)

Wawancara lebih lanjut dilakukan dengan ibu Raisah Vinora Putri selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan yang menyatakan bahwa pemilih pemula perempuan dengan bukan pemilih pemula tetap memiliki hak sama dalam memberikan partisipasinya. Akan tetapi pemilih pemula cenderung mendapatkan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan partisipasi. Pemilih pemula terkadang hari ketika hari pemilihan, beberapa di antaranya kebingungan dalam menentukan pilihan dan pada akhirnya sembarangan dalam memilih. Ada juga pemilih pemula yang lebih memilih golput dikarenakan tidak mengenali sama sekali kandidat, dorongan untuk memilih bukan berasal dari dalam dirinya sendiri, melainkan atas dorongan orang tua tua pengurus setempat dalam memberikan partisipasinya. Lebih lanjut pemilih pemula perempuan mengatakan hambatan dalam berpartisipasi politik disebabkan oleh berbagai macam kesibukan yang tidak bisa mereka tinggalkan misalnya sedang merantau karena tugas perkuliahan dan pekerjaan lainnya sehingga membuat perempuan terhambat untuk ikut berpartisipasi politik pada pemilihan pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017.[[6]](#footnote-6)

1. Pendidikan

Sebagaimana di uraikan pada bagian sebelumnya bahwa pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (means years schooling) dan angka melek huruf. Tingkat pendidikan akan memberikan pengaruh terhadap partisipasi perempuan. Sekalipun pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan pendidikan. Kesenjangan perempuan dan laki-laki masih nampak ada.

Pendidikan adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan pendidikan perempuan indonesia. Sehubungan dengan itu maka budaya-budaya dan segala hal yang menghambat kesempatan kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilanya harus diluruskan dan diperhatikan oleh yang berdaya seperti pemerintah, orangtua terhadap anak, orang yang kaya terhadap orang miskin karena pendidikan adalah salah satu jalan menjadikan perempuan sebagai agen perubahan dan bukan sekedar penerima program pemberdayaan secara pasif.

Pendidikan dapat meningkatkan kapabilitas seseorang, begitupun perempuan. Pendidikan penting untuk perempuan bukan karena alasan bahwa jenis kelamin mereka adalah perempuan sehingga harus memperoleh pendidikan, tetapi karena mereka adalah manusia yang memang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara karena pendidikan juga merupakan hak dasar bagi setiap manusia baik laki laki maupun perempuan. Data jenjang pendidikan pada perempuan di kecamatan Senapelan tidak akan uraikan lebih detail, namun jenjang pendidikan pada perempuan di kecamatan Senapelan relatif baik.

Pendidikan pemilih sangat berpengaruh pada penjatuhan pilihan pemilih perempuan.Pendidikan dalam lingkup formal (sekolah) dan non-formal (aktif di organisasi), berpengaruh pada daya fikir pemilih perempuan. Pemilih perempuan dengan pendidikan formal setingkat SD sampai SMA belum mengerti fungsi politik dan gender bagi kaum perempuan. Bagi pemilih perempuan dengan tingkat pendidikan formal strata S1 keatas dan yang aktif dalam pendidikan informal, pemahaman keberadaan perempuan dalam politik sudah terbentuk. Hal ini berpengaruh pada penjatuhan pilihan pemilih perempuan.

Perempuan berpendidikan dan memiliki kemandirian ekonomi akan lebih memiliki akses informasi yang lebih baik dari pada beberapa perempuan yang tidak sempat menambah ilmu pengetahuannya dan mengembangkan diri serta wawasannya baik melalui pelatihan program-progam pemberdayaan perempuan atau kegiatan lainnya karena disibukkan dengan berbagai pekerjaan, mulai dari pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habis-habisnya, merawat dan mengasuh anak dari bangun tidur sampai anak tidur kembali, melayani suami,dan kesibukan yang lainnya. Kesibukan yang sangat padat dan masalah ekonomi inilah yang menjauhkan perempuan dari sumber-sumber informasi yang sesungguhnya sangat penting bagi kemandirian dirinya.

Jumlah perempuan yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada saat ini sudah tentu lebih banyak dari pada masa tahun 70-80an. Seiring dengan semakin terbukanya kesempatan itu tentu saja banyak angan-angan dan harapan yang ingin diraih. Sebagaian ada yang ingin bekerja setelah menamatkan pendidikannya, sebagian ada yang ingin menjadi ibu rumah tangga saja tetapi memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, serta ketrampilan yang beraneka ragam, tetapi ada yang tidak memaksakan diri dan hanya menerima apa adanya tergantung keadaan, ada yang ingin bekerja di kantor, di bidang manufaktur, di bidang entertainment, atau enterpreneurship, bidang pertanian, peternakan dan perikanan, serta dibidang kepariwisataan.

Jika di lihat berdasarkan latar belakang pendidikan responden, sebagian besar responden dengan latar pendidikan SD dan SMP berpendapat bahwa perempuan harusnya berada dalam peran domestik dan reproduksi saja. Menurut responden tersebut pekerjaan domestik seperti mengurus rumah, memasak dan merawat anak merupakan tanggung jawab utama seorang perempuan. Namun, jika jawaban di kelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan maka jawaban yang dihasilkan dari masing masing segmentasi tingkat pendidikan akan berbeda. Menurut responden dengan tingkat pendidikan tamat SD perempuan tidak pantas bekerja di luar rumah atau lingkungan keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fikri dari KPU Kota Divisi Perencanaan Program, Data dan Informasi yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memang sangat berpengaruh dalam memberikan partipasi politik. Akan tetapi terhadap perempuan yang tingkat pendidikan yang menengah ke dasar memang menjadi tantangan kedepannya agar perlu dilakukan sosialiasi lebih agar ada peningkatan partisipasi politik perempuan yang merata dan menyeluruh.

Wawancara lebih lanjut dengan Raisah Vinora Putri selaku Ketua selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan yang mengatakan bahwa Permasalahan pendidikan sebenarnya tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Tinggi rendahnya pendidikan perempaun, jika memang tertarik dengan masing kandidat pasti akan memberikan partisipasi. Tingkat pendidikan perempuan di Kecamatan Senapelan terbilang cukup tinggi.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan hasil wawancara Herlina Indayani selaku masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Senapelan menyatakan bahwa “Pendidikin memang memberikan pengaruh dalam rangka melihat dan mengenali kandidat kepala daerah. saya sendiri selaku masyarakat yang tidak terlalu tinggi jenjang pendidikannya juga sangat cermat dalam menentukan pilihan terhadap kandidat.”[[8]](#footnote-8)

Wawancara lebih lanjut dengan Zulia umur 24 selaku masyarakat berstatus mahasiswa yang berdomisili di Kecamatan Senapelan menyatakan bahwa “ Jenjang pendidikan perguruan tinggi membuat saya dalam menentukan pilhan sangat cermat. Tidak hanya sebatas memilih, akan tetapi juga melihat kualitas visi misi yang di usung calon.”

Maka berdasarkan uraian diatas bahwa dalam konstelasi politik, kualitas dan kapabilitas perempuan sangat memengaruhi pilihannya terhadap kandidat kepala daerah. Selain itu juga pendidikan akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat pilihannya terhadap kandidat kepala daerah. Pentingnya pendidikan bagi perempuan Indonesia sebagai bekal hidup yang lebih bahagia sejahtera, berkualitas tinggi, dan mandiri serta lebih memberdayakan perempuan baik dalam institusi keluarga maupun dalam masyarakat dan pembangunan nasional.

Upaya lain adalah meningkatkan keikutsertaan perempuan Indonesia dalam berbagai aktivitas ekonomi sehingga menjadi perempuan yang mengerti hak-haknya dan berani memperjuangkan hak-haknya tersebut, mandiri, tidak selalu bergantung pada suami atau orang lain, dan memiliki penghasilan sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk membahas.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik sebagaimana yang disampaikan oleh Herbert McClosky. Menurut Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). Definisi yang dikemukakan McClosky sebagaiamana yang dikutip oleh Miriam Budiardjo menitikberatkan pada tindakan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik yaitu adanya tindakan sukarela dari warga masyarakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.[[9]](#footnote-9) Partisipasi politik berkaitan erat dengan kesadaran politik. Masyarakat yang berpartisipasi dalam politik sadar bahwa tindakan mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut penulis bahwa 2 (dua) indikator diatas patut menjadi perhatian dalam mengevaluasi tidak stabilnya angka partisipasi perempuan dengan jumlah pemilih tetap khsusus pemilih pemula perempuan. Partisipasi yang diharapkan disini tidak hanya sekedar datang dan pergi ketika Hari H pemilihan, akan tetapi kualitas partisipasi yang perlu ditingkatkan. Misalnya aktif dalam setiap tahapan. Apalagi terhadap pemilih pemula terkadang kebingungan ketika hari pemilihan, kebingungan dalam menentukan pilihan dan pada akhirnya sembarangan dalam memilih. Ada juga pemilih pemula yang lebih memilih golput dikarenakan tidak mengenaloi sama sekali kandidat, dorongan untuk memilih bukan berasal dari dalam dirinya sendiri, melainkan atas dorongan orang tua tua pengurus setempat dalam memberikan partisipasinya. Lebih lanjut pemilih pemula perempuan mengatakan hambatan dalam berpartisipasi politik disebabkan oleh berbagai macam kesibukan yang tidak bisa mereka tinggalkan misalnya sedang merantau karena tugas perkuliahan dan pekerjaan lainnya sehingga membuat perempuan terhambat untuk ikut berpartisipasi politik pada pemilihan pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017. Sehingga kualitas partisipasi yang perlu menjadi bahan perhatian dan evaluasi.

**3.2. Faktor Penghambat Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan faktor penghambat rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Walikota Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada tahun 2017. Beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Rendahnya Kepercayaan Politik

Rendahnya partisipasi memilih masyarakat dilatarbelakangi munculnya kekecewaan masyarakat akibat janji pemilu yang tak kunjung pernah menjadi kenyataan. Rakyat mulai sadar dan merasa hanya dibutuhkan suaranya saat pemilu, selanjutnya diabaikan ketika kekuasaan telah tercapai. Janji kampanye para kontestan pemilu seolah-olah hanya menjadi pemanis bibir semata untuk mengelabui rakyat agar tertarik memilih dirinya. Maka tidak heran bila sebagian besar rakyat menganggap janji politik sangat identik dengan kebohongan. Munculnya rasa ketidakpercayaan ini bukan tanpa sebab. Banyaknya penyelewengan seperti masalah korupsi yang terjadi di tubuh pemerintahan membuat rasa ketidakpercayaan semakin menguat dan berkembang di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Herlina Indayani selaku masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Senapelan menyatakan bahwa “Salah satu faktor yang membuat partisipasi rendah itu karena masyarakat sudah tahu, untuk apa sebuah janji kalau tidak ada pembuktian. Sementara selama ini, kalau kita lihat dari pemimpin-pemimpin yang sudah duduk, pada saat mencalonkan diri itu mengumbar banyak janji-janji, tapi setelah duduk lupa dengan janji tersebut. Masyarakat kan sudah pada paham, paling janji doang itu.”[[10]](#footnote-10)

Wawancara lebih lanjut dengan Suyanti selaku masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Senapelan menyatakan bahwa “Kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap permasalahan di desa apalagi di Kecamatan Senapelan yang selalu dihadapkan dengan permasalahan Sampah, Banjir dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Belum bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah lama ini. Tentunya ini menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sehingga berpengaruh pada rendahnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Senapelan khususnya dan di Kota Pekanbaru pada umunya. Oleh sebab itu untuk mengurangi fenomena masyarakat tidak memilih yang disebabkan oleh faktor kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah yang belum efektif, maka ini jadi pembelajaran bagi pemerintah yang baru agar menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya, bersih, jujur, dan amanah, sesuai dengan janji kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tinggi kembali..”

Berdasarkan penjelasan diatas, tinggi rendahnya kepercayaan kepada pemerintah tergantung pada penilaian dan apresiasi dari masyarakat. Apabila roda pemerintahan dilaksanakan dengan jujur, transparan, dan membawa perubahan di semua aspek maka tingkat kepercayaan masyarakat akan tinggi, dan sebaliknya, apabila misalnya banyak terjadi penyelewengan dan kekacauan di pemerintahan, ditakutkan pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Padahal kepercayaan merupakan esensi penting bagi pembangunan pemerintahan dan kemajuan bangsa. Kepercayaanjuga merupakan modal penting untuk berjalannya pemerintahan dengan baik.

1. Faktor Latar Belakang Sosial Ekonomi

Selain karena faktor kekecewaan dan kepercayaan masyarakat yang rendah akan pasangan calon Walikota dan wakilnya, faktor latar belakang sosial ekonomi juga ternyata menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi memilih masyarakat di Kecamatan Senapelan. Latar belakang status sosial ekonomi yang berpengaruh pada ketidakhadiran masyarakat pada pemilihan ialah dari segi Pendapatan dan Pekerjaan. Dari segi pekerjaan, disesuaikan dengan suasana kerja setiap individu sehingga berpengaruh pada kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik. Lalu dari segi pendapatan, ini berkaitan dengan jenis pekerjaan dan pendapatan yang didapat, sehingga ada untung rugi yang dipertimbangkan masyarakat terlibat dalam partisipasi politik.

Dalam profil Kecamatan Senapelan telah dijabarkan bahwa jenis pekerjaan yang mayoritas digeluti masyarakat disana ialah sebagai pedagang. Pelaksanaan pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017 dilaksanakan bertepatan hari rabu, yang merupakan hari pasar besar di Kecamatan Senapelan. Jadi faktor ini turut menjadi penyebab banyaknya masyarakat yang tidak memilih pada hari pemilihan tersebut.

Faktor penyebab ini senada dengan pernyataan dari Raisah Vinora Putri selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan yang mengatakan: “Penyebab dari masih adanya masyarakat yang tidak memilih ialah karena pelaksanaan hari H Pilkada bertepatan dengan hari ekonomi masyarakat di Kecamatan Senapelan, walaupun kebijakan pemerintah memberikan dispensasi libur”. Lebih lanjut masyarakat terkhusus perempuan mengatakan hambatan dalam berpartisipasi politik disebabkan oleh berbagai macam kesibukan yang tidak bisa mereka tinggalkan sehingga membuat perempuan terhambat untuk ikut berpartisipasi politik pada pemilihan pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017.[[11]](#footnote-11)

Begitu juga yang disampaikan berdasarkan wawancara dengan Bapak Fikri dari KPU Kota Divisi Perencanaan Program, Data dan Informasi yang menyatakan bahwa “Salah satu faktor masyarakat yang tidak memilih pada Pelaksanaan pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017 antara lain karena pelaksanaan pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017 bertepatan dengan jam kerja. Sehingga perempuan yang bekerja pada waktu tesebut tidak dapat menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017. Hal ini juga semakin diperkuat dengan jarak TPS dengan lokasi kerja.[[12]](#footnote-12)

Tuntutan perekonomian juga mengharuskan seseorang berpikir keras untuk bagaimana bisa mendapatkan pendapatan lebih baik. Lapangan kerja yang minim, membuat banyak masyarakat pergi merantau ke kota, dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Namun pekerjaan di perantauan kerap kali menjadi kendala bagi seseorang untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan karena suasana kerja dan waktu yang tidak mendukung.

1. Faktor Kurangnya Sosialisasi

Bismar Arianto dalam Penelitiannya membagi faktor penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri sendiri yang mengakibatkan seorang pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu seperti faktor teknis dan faktor pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau pengaruh dari keadaan sekitar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.[[13]](#footnote-13) Contohnya adalah faktor sosialisasi yang kurang. Faktor sosialisasi yang kurang ini juga turut menjadi penyebab masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya di kecamatan senapelan kota Pekanbaru.

Politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh baik secara sengaja melalui pendidikan formal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Jadi dengan adanya sosialisasi, secara tidak langsung akan menambah kepekaan masyarakat pada kehidupan politik negaranya dan menentukan sikapnya pada pemilihan umum yang diselenggarakan.

Menjelang pelaksanaan pemilu biasanya pemerintah melalui lembaga penyelenggara pemilu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui informasi pelaksanaan pemilu yang akan dihadapi, mengenalkan pasangan calon kandidat yang berkontestasi, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya berpartisipasi menggunakan hak pilihnya masing-masing. Ini merupakan pekerjaan rumah KPU, Bawaslu, beserta petugas-petugas pemilihan sampai tingkat desa.

Sosialisiasi ini tentunya dapat berimplikasi meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggara pemilu. Namun pada praktiknya, sosialisasi kerap dinilai kurang, khususnya ditingkat masyarakat desa. Berkaitan dengan ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Indah Permata selaku masyarakat di kecamatan senapelan kota Pekanbaru mengatakan bahwa “Sosialisasi dari KPU kota perlu ditingkatkan lagi terkhusus dari menarik partisipasi perempuan. Partisipasi sejajar perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah semata-mata sebuah tuntutan akan keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting agar kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan.[[14]](#footnote-14)

Wawancara lebih lanjut dengan Bapak Fikri dari KPU Kota Divisi Perencanaan Program, Data dan Informasi yang menyatakan bahwa “KPU kota Pekanbaru sebenarnya telah berupaya melakukan sosialisai pada Pelaksanaan pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017. Hanya saja keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana lainnya menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksaan sosialisasi. Kedepannya memang perlu dikhususkan materi sosialisasi terhadap perempuan dalam rangka mendorong dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam setiap agenda demokrasi seperti pemilu, pilkada dan lain sebagainya.

Selain sosialisasi dari lembaga penyelenggara pemilu, kampanye dari para kandidat, partai politik, dan tim pemenangan, juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui kampanye pastilah masing-masing kandidat mengupayakan agar bisa memiliki kedekatan dengan masyarakat, namun bagaimana masyarakat bisa dekat dan kenal dengan sosok Walikota kalau di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017 nya tidak ada kampanye. Inilah yang terjadi di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017, dimana menurut penuturan beberapa informan tidak ada kampanye yang dilakukan di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017.

Sementara wawancara dengan Raisah Vinora Putri selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan yang mengatakan bahwa sosialisasi harus dijalankan dengan maksimal, karena di kecamatan senapelan kota Pekanbaru dengan jumlah DPT terbesar ini memberi peluang besar untuk menyumbangkan jumlah partisipasi pemilih yang tinggi. Sosialisasi yang intens dilaksanakan, bisa mempengaruhi sikap dan penilaian masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar dan tergerak hatinya untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut .[[15]](#footnote-15) Meskipun sederhana, perlu sosialisasi yang kuat dari lembaga penyelenggara pemilu untuk bisa membangun kesadaran dan kemauan memilih di masyarakat, sebab rentetan pelaksanaan pemilu yang dihadapi masyarakat bukan hanya sampai pada tahap pemilihan gubernur saja. Penyebab yang lain juga karena kurangnya sosialisasi dari KPU dan Bawaslu sehingga kurang pengertian dari masyarakat akan pentingnya memilih seorang Gubernur yang menurut mereka itu tidak menyentuh langsung ke masyarakat.

Begitu pula dengan sosialisasi dari perangkat desa maupun petugas pemilihan di desa, harus juga dilakukan, sebab perangkat desa ini yang lebih dekat dengan masyarakat desa. Tentunya ini menjadi catatan penting buat perangkat desa untuk sama-sama dengan KPU mensukseskan pemilu dan meningkatkan jumlah pemilih di di kecamatan senapelan kota Pekanbaru pada pemilihan selanjutnya. Tidak hanya sekedar mengatakan tanggal pemilihan dan memberi surat undangan saja.

Angka partisipasi perempuan yang tidak stabilnya di kecamatan senapelan kota Pekanbaru ini terjadi karena tidak ada rangsangan politik yang di dapatkan masyarakat, baik itu melalui sosisalisasi pemilu maupun kampanye dari masing-masing calon. Seperti pendapat dari Morris Rosenberg (1954) yang menyebutkan salah satu alasan mengapa orang apatis terhadap politik ialah ketiadaan faktor untuk “memacu diri untuk bertindak” atau disebut juga sebagai “perangsang politik”.[[16]](#footnote-16) Ketiadaan dorongan untuk bertindak ini pun membuat kesadaran dan motivasi untuk pergi ke TPS menjadi rendah. Apalagi masyarakat sudah sering mengikuti kegiatan pemilihan sehingga tidak dipungkiri ada rasa jenuh dan bosan untuk memilih ditambah pula masyarakat merasa sosok Gubernur tidak dekat dan menyentuh langsung dengan masyarakat di kecamatan senapelan kota Pekanbaru. Oleh sebab itu sosialisasi sangat penting dilakukan untuk kembali memacu kesadaran semangat masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya demi terpilihnya pemimpin-pemimpin yang benar-benar berdasarkan pilihan masyarakat.

1. Faktor Administrasi

Faktor Administrasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakhadiran pemilih dalam kegiatan pemilihan. Faktor ini jugalah yang berpengaruh pada rendahnya partisipasi pada pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017. Administrasi dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit, administrasi merupakan semua kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, surat-menyurat, serta penyimpanan, dan pengurusan hal-hal yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.[[17]](#footnote-17) Ridwan HR mengartikan administrasi sebagai: 1.) Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan administrasi, 2.) Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan, 3.) Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, 4.) Kegiatan kantor dan tata usaha.[[18]](#footnote-18) Faktor administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah faktor yang berkaitan dengan sistem administrasi pemilu yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Seperti tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak mendapatkan undangan/kartu pemilihan, tidak memiliki identitas kependudukan (KTP), Pindah alamat/tempat tinggal, dan sebagainya.

Secara teknis, bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya. Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan tersedianya fasilitas pelaksaaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fikri dari KPU Kota Divisi Perencanaan Program, Data dan Informasi yang menyatakan bahwa petiap penyelenggaraan pemilihan umum, proses pendataan daftar pemilih selalu menjadi perhatian karena kerap menimbulkan persoalan. Ini tak bisa dipungkiri karena kondisi penduduk setiap harinya berubah, ada yang bertambah dan berkurang, sehingga tahap pemuktahiran daftar pemilih sering kali terhambat. Padahal masalah daftar pemilih ini sangat krusial karena kalau tidak dilakukan dengan benar dan akurat, hak konstitusional masyarakat sebagai pemilih juga akan terganggu.

Wawancara lebih lanjut dengan Raisah Vinora Putri selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan yang mengatakan bahwa Permasalahan ini juga lah yang dirasakan di Kecamatan terkait dengan pemuktahiran daftar pemilih pada pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017.[[20]](#footnote-20) Hambatan yang dialami sebelum hari pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017 ialah susahnya akurasi daftar pemilih, dikarenakan administrasi pemilih yang berpindah-pindah”.

Pernyataan diatas berhubungan dengan persoalan pemuktahiran dan akurasi tampak sangat nyata pada apa yang disebut “pemilih siluman” (ghost voters), yaitu nama pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah lama pindah, warga negara yang belum berhak memilih, pemilih yang juga terdaftar di dua atau lebih daerah lain.[[21]](#footnote-21)

Dari beberapa perbincangan di atas, susahnya akurasi daftar pemilih akibat administrasi penduduk yang berpindah-pindah sesuai pernyataan Bapak Fikri sebelumnya, disebabkan masyarakat di kecamatan senapelan kota Pekanbaru banyak yang tidak melaporkan kepada perangkat desa setempat perihal perpindahannya ke daerah lain, maupun untuk masyarakat baru yang belum mendaftarkannya secara sah menjadi masyarakat kecamatan senapelan kota Pekanbaru. Begitu juga untuk masyarakat yang tidak bisa memilih di lokasi TPS sesuai DPT nya, karena bekerja di luar kota atau lainnya, sebenarnya tetap bisa memilih dengan mengurus surat keterangan pindah memilih kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yaitu pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Nantinya pemilih akan mendapatkam formulir Model A.5-KPU dan bisa memilih di lokasi TPS tujuannya.[[22]](#footnote-22) Secara langsung ini bisa mengurangi jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di kecamatan senapelan kota Pekanbaru.

Hal ini kemungkinan terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan KPU untuk memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya mengupdate atau memperbaharui status kependudukannya, dan juga mobilitas penduduk yang tinggi seringkali membuat kesadaran masyarakat rendah untuk mengurus segala administrasi kependudukan dengan baik misalnya mengurus surat pindah domisili di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) maupun pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat, serta mengganti data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) juga mengurus Akta Kematian keluarga. Padahal pertambahan dan pengurangan penduduk ini turut mempengaruhi database di Disdukcapil dan tentunya berpengaruh pada jumlah keseluruhan penduduk desa dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan di data pada pemilihan. Karena pada dasarnya Data Kependudukan dari dinas-dinas terkait ini digunakan juga untuk keperluan pendataan pemilih pada kegiatan pemilihan.

Faktor administrasi terkait jumlah DPT ini bisa terjadi disemua wilayah di Indonesia, kembali lagi karena pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk yang terus mengalami perubahan, yang membuat tahap pemuktahiran daftar pemilu sering kali tidak berjalan mulus. Tentunya masalah ini harus terus dievaluasi lembaga penyelenggara pemilu beserta panitia pemilihan sampai tingkat bawah supaya tidak ada kesalahan dalam proses pendataan daftar pemilih dan semua masyarakat bisa terdaftar dan dapat menggunakan hak pilihnya masing-masing.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik sebagaimana yang disampaikan oleh Herbert McClosky bahwa hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik yaitu adanya tindakan sukarela dari warga masyarakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.[[23]](#footnote-23) Beberapa faktor diatas patut menjadi perhatian dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi tidak stabilnya angka partisipasi perempuan dengan jumlah pemilih tetap khsusus pemilih pemula perempuan. Hal tersebut antara lain faktor rendahnya kepercayaan politik, faktor latar belakang sosial ekonomi, faktor kurangnya sosialisasi, dan faktor administratif. Tinggi rendahnya kepercayaan kepada pemerintah tergantung pada penilaian dan apresiasi dari masyarakat. Tuntutan perekonomian juga mengharuskan seseorang berpikir keras untuk bagaimana bisa mendapatkan pendapatan lebih baik. Sosialisiasi dalam hal ini tentunya berimplikasi pada peningkatan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggara pemilu. Faktor administrasi berkaitan dengan pemuktahiran dan akurasi pemilih perempuan. Hal ini menurut penulis menjadi faktor penghambat tidak stabilnya angka partisipasi perempuan dengan jumlah pemilih tetap khsusus pemilih pemula perempuan. Sudah seharusnya ada dorongan agar setiap masyarakat yang berpartisipasi dalam politik sadar bahwa tindakan mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan terkhusus pada pemilihan kepala daerah.

**3.3.** **Upaya Dilakukan** **Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**

Mengingat tingkat partisipasi politik masyarakat baik secara kualitatif dan kuantitatif dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik suatu daerah, karena rendah atau tingginya partisipasi masyarakat merupakan indikator dalam pembangunan politik dan perkembangan bangsa dan negara ini. Adapun beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sosialisasi

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup (Hendrik, 2010). Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan UndangUndang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain.

Sehingga partai politik selaku organisasi yang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain dan sebagai manifestasi dari suatum sistem politik yang sudah moderen atau sedang dalam proses menunju modernisasi, seolah semakin tenggelam dan dilupakan oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya dalam hal ini mendorong partai politik agar tetap memiliki eksitensi sebagai kerangka kelembagaan yang memawadahi eksistensi aktivitas politik masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, nampaknya peningkatan kecerdasan serta pengetahuan berdemokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu yang jujur dan adil di Kota Pekanbaru sebagai wujud dari kesadaran berpolitik masyarakat berjalan berdasarkan pada pengalaman masyarakat, tanpa adanya keterlibatan dari komponen infrasturktur politik, yang salah satunya partai politik. Akan tetapi meskipun dilihat seperti itu, kesadaran berpolitik masyarakat telah dapat meningkat jika dilihat dari minimnya tingkat konflik antar pendukung pasangan calon dan tingginya keinginan masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing tetap aman.

Hal ini tentunya menunjukan bahwa kesadaran berpolitik masyarakat sangat berhubungan erat dengan kondisi psikologis masyarakat itu sendiri artinya ketika masyarakat merasakan apa yang menjadi ihwal keinginannya maka kesadaran akan terbangun dari dalam dirinya. Budiardjo (2008: 22) mengatakan bahwa “tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan”. Pandangan tersebut seolah menandakan bahwa partisipasi politik yang terbentuk dari kesadaran individu ketika apa yang menjadi harapan dan keinginanya telah dapat terwujudkan. Sebagai gambaran apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka paritisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Namun kendati dipandang seperi itu, masih bisa saja terjadi ada partisipasi politik tanpa kesadaran politik pada masyarakat pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya tanpa mempertimbangkan kualitas maupun dampak yang dirasakan, tetapi sebagai akibat dari adanya ajakan atau arahan dari pihakpihak tertentu sehingga menghasilkan tindakan hanya asal memilih tidak sesuai dengan aspirasinya. Partisipasi politik masyarakat yang seperti ini dapat dikatakan sebagai tipe pemilih skeptis, artinya mereka tidak memiliki landasan atau orientasi yang tinggi dalam aktivitas politik baik terhadap partai politik maupun kandidat yang calon. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tidak adanya kepedulian atau ikatan ideologi terhadap masyarakat pada golongan tersebut.

Perlu kiranya mejadi perhatian seksama bahwa partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Maka dari itu terciptalah social control yang berasal dari people power yang cerdas dan bermoral. Dari masyarakat seperti ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil, dan beradab.

Sementara itu, trend partisipasi pemilih dalam Pemilu cenderung mengalami penurunan, yang berarti tingkat Golput mengalami peningkatan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, dalam tataran regional jika dibandingkan dengan tataran nasional. Oleh karena itu bertepatan dengan momentum pelaksanaan pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017 merupakan salah satu kesempatan yang baik untuk melihat dan mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat yang ditinjau dari faktor adanya perangsang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017.

Dengan melihat pada informasi yang diperoleh, menunjukan isi atau kontens terkadandung dalam sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 yang dilakukan oleh pihak Komisisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dan Pemerintah Daerah, nampaknya mampu dipahami oleh masyarakat di Kota Pekanbaru, karena dari setiap informan hampir semua mengetahui mengenai informasi mengenai Pilkada, akan tetapi apabila di telaah dari beberapa informan ada yang mengetahui secara jelas namun ada pula yang hanya mengetahui sebatas apa yang mereka terima. Dari penjelasan tersebut dapat analisa bahwa aktivitas atau kegiatan sosoalisasi tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di Kota Pekanbaru sudah dilakukan pada masyarakat pengguna hak pilih.

Tetapi hal itu dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat secara luas, karena masih ditemui masyarakat di segmenitas tertentu dengan tingkat kepedulian untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rendah, artinya informasi proses sosialisasi atau penyampaian pesan politik untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan kemandirian pada masyarakat dalam mengisi ruang publik sehingga memiliki kemampuan untuk menentukan nasib dan kualitas kehidupan di masa yang akan datang dengan menyalurkan hak pilihnya pada pemilu.

Berkaitan dengan ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Indah Permata selaku masyarakat di kecamatan senapelan kota Pekanbaru mengatakan bahwa “Sosialisasi dari KPU kota perlu ditingkatkan lagi terkhusus dari menarik partisipasi perempuan. Partisipasi sejajar perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah semata-mata sebuah tuntutan akan keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting agar kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan.[[24]](#footnote-24)

Wawancara lebih lanjut dengan Bapak Fikri dari KPU Kota Divisi Perencanaan Program, Data dan Informasi yang menyatakan bahwa “KPU kota Pekanbaru sebenarnya telah berupaya melakukan sosialisai pada Pelaksanaan pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017. Hanya saja keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana lainnya menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksaan sosialisasi. Kedepannya memang perlu dikhususkan materi sosialisasi terhadap perempuan dalam rangka mendorong dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam setiap agenda demokrasi seperti pemilu, pilkada dan lain sebagainya.[[25]](#footnote-25)

Sementara wawancara dengan Raisah Vinora Putri selaku Ketua selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan yang mengatakan bahwa sosialisasi harus dijalankan dengan maksimal, karena di kecamatan senapelan kota Pekanbaru dengan jumlah DPT terbesar ini memberi peluang besar untuk menyumbangkan jumlah partisipasi pemilih yang tinggi. Sosialisasi yang intens dilaksanakan, bisa mempengaruhi sikap dan penilaian masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar dan tergerak hatinya untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut .[[26]](#footnote-26)

Maka dalam rangka meningkatkan peran terhadap pelaksanaan sosialisasi, menurut penulis perlu melibatkan beberapa pihak terkait. Pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah sangat penting dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pemerintah daerah karena pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini dilimpahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sangat sentral sekali. Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum sangat bergantung kepada pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berkoordinasi dengan berbagai institusi, diantaranya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kota Pekanbaru terkait dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kemudahan penerbiatan KTP Eletkronik sebagai salah satu syarat bagi masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkada. Kemudian dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Pekanbaru terutama dalam sosialisasi dan pemberian informasi tentang Pilkada bagi masyarakat, dengan memanfaatkan forum kemasyarakatan yang ada dibawah naungan Kesbangpol kota Pekanbaru

1. Peran Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarkatan dalam hal ini, meliputi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini banyak berperan aktif dalam melakukan penyebarluasan informasi dan mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pemilihan Walikota dan Wakilnya kota Pekanbaru. Hal ini lebih mudah diterima oleh masyarakat karena lembaga kemasyarakat ini bersifat informal dan sering bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, meskipun pada dasarnya ditumpangi dan bahkan berapiliasi dengan salah satu pasangan calon yang akan maju di Pilkada, tetapi hal ini dipandang dapat menggerakan dan meningkatkan partisipasi politik masyarkat.

1. Peran Tokoh Masyarakat

Kondisi dan karakteristik masyarakat Kota Pekanbaru khususnya kecamatan Senapelan tidak dapat terpisahkan dari keberadan tokoh masyarakat selaku pemangku kepentingan yang berada di daerah. Selama ini peran tokoh masyarakat, terutama dari golongan tokoh agama dan tokoh tetua kampung, sangat berperan dalam mengajak dan mengarahkan perilaku masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Pekanbaru. Karena persepsi masyarakat terhadap para tokoh masyarakat masih dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan dan pengetahuan yang lebih bijak dalam menentukan pempimpin

1. Perbaikan tata kelola Administrasi

Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting.

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Maka terhadap permasalahan Administrasi dalam persyaratan pemilihan, perlu di evaluasi lagi. Perlu dilakukan akurasi terhadap daftar pemilih akibat administrasi penduduk yang berpindah-pindah, disebabkan masyarakat di kecamatan senapelan kota Pekanbaru banyak yang tidak melaporkan kepada perangkat desa setempat perihal perpindahannya ke daerah lain, maupun untuk masyarakat baru yang belum mendaftarkannya secara sah menjadi masyarakat kecamatan senapelan kota Pekanbaru.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik sebagaimana yang disampaikan oleh Herbert McClosky bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dan hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik yaitu tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.[[27]](#footnote-27) Dalam hal ini anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa partisipasi mereka sangat memberikan pengaruh. Peningkat kesadaran akan penting partisipasi politik perempuan dalam rangka agar stabilnya angka partisipasi dalam pemilihan merupakan ikhtiar yang terus berlanjut dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan dan stabilnya angka partisipasi dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota pekanbaru antara lain melakukan meningkatkan sosialisasi, dan perbaikan tata kelola administrasi. sosialisasi yang intens dilaksanakan dengan melibatkan Peranan pemerintah, Lembaga kemasyarkatan, dan keberadan tokoh masyarakat. Perbaikan tata kelola Administrasi dilakukan akurasi terhadap daftar pemilih akibat administrasi penduduk yang berpindah-pindah. Sehingga untuk pemilihan Walikota angka partisipasi stabil dan meningkat jumlahnya.

**3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Tidak stabilnya tingkat partisipasi politik perempuan dalam setiap agenda pemilihan terutama angka partisipasi perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor rendahnya kepercayaan politik, faktor latar belakang sosial ekonomi, faktor kurangnya sosialisasi, dan faktor administrasi. Sama halnya temuan dari penelitian Edrial dengan judul “Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi Kasus Partisipasi Pemilih Perempuan Di Kecamatan Sumbawa” bahwa Pemahaman politik pemilih perempuan di Sumbawa secara general masih pada tahap pembolehan perempuan terlibat didunia politik. Ini mengindikasikan pemahaman gender pemilih perempuan masih pada kulit luarnya saja. Adapun Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Perempuan dengan Hadirnya Calon Wakil Gubernur Perempuan antara lain faktor Keluarga, Patriarki, tingkat Pendidikan, kurangnya Sosialisasi dari pemerintah dan dari LSM maupun kalangan aktivis perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat perlu dilakukan upaya untuk berkelanjutan. Maka penting untuk mengindentifikasi masalah yang sama tetapi lebih ditingkatkan upaya yang harus dilakukan. Karena Partisipasi yang diharapkan disini tidak hanya sekedar datang dan pergi ketika Hari H pemilihan, akan tetapi kualitas partisipasi yang perlu ditingkatkan. Sehingga kualitas partisipasi yang perlu menjadi bahan perhatian dan evaluasi. Tinggi rendahnya kepercayaan kepada pemerintah tergantung pada penilaian dan apresiasi dari masyarakat. Tuntutan perekonomian juga mengharuskan seseorang berpikir keras untuk bagaimana bisa mendapatkan pendapatan lebih baik. Sosialisiasi  dalam hal ini tentunya berimplikasi pada peningkatan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggara pemilu. Faktor administrasi berkaitan dengan pemuktahiran dan akurasi pemilih perempuan. Upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota pekanbaru antara lain evaluasi sosialisasi, dan perbaikan tata kelola administrasi. sosialisasi yang intens dilaksanakan dengan melibatkan Peranan pemerintah, Lembaga kemasyarkatan, dan keberadan tokoh masyarakat. Perbaikan tata kelola Administratif dilakukan akurasi terhadap daftar pemilih akibat administrasi penduduk yang berpindah-pindah.

1. **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwaTingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017 tidak stabilnya angka partisipasi perempuan dengan jumlah pemilih tetap khsusus pemilih pemula perempuan. Partisipasi yang diharapkan disini tidak hanya sekedar datang dan pergi ketika Hari H pemilihan, akan tetapi kualitas partisipasi yang perlu ditingkatkan. Sehingga kualitas partisipasi yang perlu menjadi bahan perhatian dan evaluasi. Faktor penghambat rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota Pekanbaru tahun 2017 antara lain faktor rendahnya kepercayaan politik, faktor latar belakang sosial ekonomi, faktor kurangnya sosialisasi, dan faktor administratif. Tinggi rendahnya kepercayaan kepada pemerintah tergantung pada penilaian dan apresiasi dari masyarakat. Tuntutan perekonomian juga mengharuskan seseorang berpikir keras untuk bagaimana bisa mendapatkan pendapatan lebih baik. Sosialisiasi dalam hal ini tentunya berimplikasi pada peningkatan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggara pemilu. Faktor administrasi berkaitan dengan pemuktahiran dan akurasi pemilih perempuan. Upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Walikota di kecamatan senapelan kota pekanbaru antara lain evaluasi sosialisasi, dan perbaikan tata kelola administrasi. sosialisasi yang intens dilaksanakan dengan melibatkan Peranan pemerintah, Lembaga kemasyarkatan, dan keberadan tokoh masyarakat. Perbaikan tata kelola Administratif dilakukan akurasi terhadap daftar pemilih akibat administrasi penduduk yang berpindah-pindah**.**

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pihak Kecamatan Senapelan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adya Barata, Atep., 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan*. Prima cetakan 2. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Ahmadi, Ruslan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Heryanto, Gun Gun, 2013 *Komunikasi Politik: Sebuah* *Pengantar.*Bogor : Ghalia Indonesia.

Marsono, 2015. *Kepala* *Daerah Pilihan Rakyat.*  Jakarta : CV Eko Jaya.

Ross, M. G. (1967). *Community Organization: theory, principles and practice*. Harper & Row Publishers, New York.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Indonesia: Pustaka LP3ES.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

1. Miriam Budiardjo,.*Dasar-Dasar**Ilmu**Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 369. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ramlan, Subakti, *Memahami**Ilmu**Politik*. PT. Gramedia, Jakarta,1999, hlm. 311. [↑](#footnote-ref-2)
3. # https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/riau/kota\_pekanbaru/senapelan

   [↑](#footnote-ref-3)
4. # https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/riau/kota\_pekanbaru/senapelan

   [↑](#footnote-ref-4)
5. wawancara dengan Bapak Fikri dari KPU Kota Divisi Perencanaan Program, Data dan Informasi [↑](#footnote-ref-5)
6. wawancara dengan Raisah Vinora Putri selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara dengan Raisah Vinora Putri selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan [↑](#footnote-ref-7)
8. Hasil wawancara Herlina Indayani selaku masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Senapelan [↑](#footnote-ref-8)
9. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367 [↑](#footnote-ref-9)
10. hasil wawancara Herlina Indayani selaku masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Senapelan [↑](#footnote-ref-10)
11. wawancara dengan Raisah Vinora Putri selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan [↑](#footnote-ref-11)
12. wawancara dengan Bapak Fikri dari KPU Kota Divisi Perencanaan Program, Data dan Informasi [↑](#footnote-ref-12)
13. Bismar Arianto, *Loc.cit*,. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hasil wawancara dengan Indah Permata selaku masyarakat di kecamatan senapelan kota Pekanbaru [↑](#footnote-ref-14)
15. wawancara dengan Raisah Vinora Putri selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan [↑](#footnote-ref-15)
16. Damsar, Op.cit., hal 192 [↑](#footnote-ref-16)
17. Novianto M. Hantoro, Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD Tahun 2014, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 5, No 2, 2014, hal. 110, tersedia di situs: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/236/177, diakses pada 07 Maret 2022, pukul 15.09 WIB [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*. hal 30 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy’ari, 2011, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemuktahiran Daftar*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hal 5, Tersedia pada https://media.neliti.com/media/publications/45200-ID-meningkatkan-akurasi-daftar-pemilih-mengatur-kembali-sistem-pemilih-pemutahiran.pdf, diakses pada 1 September 2021, Pukul 21.17 WIB [↑](#footnote-ref-19)
20. Wawancara dengan Raisah Vinora Putri selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* hal 18 [↑](#footnote-ref-21)
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36 [↑](#footnote-ref-22)
23. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm, 367. [↑](#footnote-ref-23)
24. hasil wawancara dengan Indah Permata selaku masyarakat di kecamatan senapelan kota Pekanbaru [↑](#footnote-ref-24)
25. Wawancara via chatting di aplikasi Masseger dengan Bapak Nurdin Tambunan, Masyarakat Desa Batang Kumu, pada 9 September 2020 [↑](#footnote-ref-25)
26. Wawancara dengan Raisah Vinora Putri selaku Sekretaris Kecamatan Senapelan [↑](#footnote-ref-26)
27. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 367. [↑](#footnote-ref-27)